GEOGRAFIS KOTA MAJALENGKA DALAM KAITANNYA DENGAN KONSEP BENTUK LAHAN DAN TATA KOTA

City of Majalengka Geographic in Conjunction with Landform and Lay Out

Nanang Saptono

Balai Arkeologi Bandung
Jl. Raya Cinunuk Km. 17 Cileunyi, Bandung 40623
E-mail: nangsap@yahoo.co.id

Naskah diterima redaksi: 22 Februari 2014 – Naskah dikembalikan untuk direvisi: 10 Juni 2014
Naskah disetujui terbit: 16 Juni 2014

Abstract

The cities in West Java grow and evolve in accordance with the development of trade. The city development in the West Java based on the concept of site selection. In addition, the pattern and structure of cities also have a certain symbolic significance, especially related to power. This study aims to determine the concept of topographical choice and pattern of Majalengka city. Through descriptive study, it was conducted a research about Majalengka city. The Majalengka city was built in the early 20th century. The concept of site selection follows the concept of warugan lemah. The pattern and structure of the city are divided into several blocks. The western part of the city is sacred while the eastern region was the profane part.

Keywords: city, area, structure, meaning, sacred, profane

Abstrak

Kota-kota di Jawa Barat tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan perdagangan. Pembangunan kota di Jawa Barat dilandasi dengan konsep pemilihan lokasi. Selain itu pola dan struktur kota juga memiliki makna simbolis tertentu terutama berkaitan dengan kekuasaan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pemilihan topografis dan pola Kota Majalengka. Melalui metode deskriptif telah dilakukan telaah terhadap Kota Majalengka. Kota Majalengka dibangun pada awal abad ke-20. Konsep pemilihan lokasi mengikuti konsep *warugan lemah*. Pola dan struktur kota terbagi dalam beberapa blok. Bagian barat kota merupakan kawasan sakral, sedangkan kawasan timur merupakan bagian profan.

Kata kunci: kota, lahan, struktur, makna, sakral, profan

PENDAHULUAN

Perkembangan kota-kota di pesisir utara Jawa Barat tidak lepas dari kedatangan Islam di Indonesia. Tomé Pires pada bulan Maret – Juni 1513 menyusuri pantai utara

Jawa dan singgah di pelabuhan-pelabuhan *Bantam, Pomdam, Cheguide, Tamgaram, Calapa, Chemano, dan Cheribon*. Menurut Tomé Pires selain Cirebon, pelabuhan-pelabuhan itu merupakan milik Kerajaan Sunda. Masyarakat yang

bermukim di Cimanuk (Indramayu) dan Cirebon pada waktu itu sudah beragama Islam. Pelabuhan ini biasa dikunjungi oleh saudagar-saudagar yang berasal dari Malaka, Palembang, Fansur, Tanjungpura, Lawe, Jawa dan negeri-negeri lain yang sebagian besar pada waktu itu telah merupakan negeri Islam atau negeri yang dikuasai penganut agama Islam (Cortês, 1967: 166).

Sebelum kedatangan Tomé Pires, sekitar abad ke-13 di pesisir utara Cirebon terdapat pelabuhan Pasambangan. Selain itu juga terdapat perkampungan, yaitu Singapura dan Surantaka di utara serta Jayapura di timur. Di wilayah pedalaman terdapat Caruban Girang. Wilayah ini masih merupakan kekuasaan Kerajaan Sunda. Pada paruh pertama abad ke-14, Jawa Barat kedatangan dua ulama, yaitu Syekh Quro yang menetap di Karawang dan Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kahfi di Amparan Jati (Cirebon). Kedatangan dua ulama ini disambut baik oleh dua putra Raja Sunda, yaitu Raden Walangsungsang dan Nyai Larasantang sehingga keduanya menganut Islam (Hardjasaputra dan Haris, 2011: 23; Graaf dan Pigeaud, 1985: 136-137).

Perkembangan selanjutnya disebutkan di dalam *Purwaka Caruban Nagari* tentang tokoh Syarif Hidayat yang datang di Gresik untuk menetap sementara dengan Sunan Ngampel. Kemudian Syarif Hidayat mendapat tugas menjadi guru agama Islam di Bukit Sembung. Syarif Hidayat yang kemudian bergelar Susuhunan Jati tiba di Cirebon Tahun 1470/1475 M (Atja, 1972: 48-68). Pada 1479 Pangeran Cakrabuana menyerahkan kedudukan dan kekuasaannya selaku penguasa Cirebon kepada Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyimas

Pakungwati putri Pangeran Cakrabuana dengan Nyai Mas Endang Geulis. Syarif Hidayatullah berusaha melepaskan kekuasaan dari Kerajaan Sunda. Pada tahun 1482 Cirebon lepas dari kekuasaan Kerajaan Sunda dan menjadi kerajaan Islam (Hardjasaputra dan Haris, 2011: 55-56).

Kerajaan Cirebon kemudian mengalami perkembangan, sehingga setelah kepemimpinan Panembahan Ratu II (1649 – 1662) berakhir, istilah kerajaan diganti dengan kesultanan. Pembentukan Kesultanan Cirebon ditandai dengan pengangkatan tiga putra Panembahan Ratu II menjadi sultan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Pangeran Martawijaya dilantik sebagai Sultan Kasepuhan dengan gelar Sultan Muhammad Samsudin, Pangeran Kartawijaya sebagai Sultan Kanoman dengan gelar Sultan Muhammad Badridin, dan Pangeran Wangsakerta sebagai Panembahan Cirebon dengan gelar Muhammad Abdulkamil Nazaruddin (Hardjasaputra dan Haris, 2011: 99).

Pada zaman pemerintahan kolonial Belanda terjadi reorganisasi wilayah pemerintahan. Pada tanggal 2 Februari 1809 Cirebon ditetapkan sebagai *prefectur*. Wilayah Cirebon dibagi dua, yaitu Cirebon Utara dan Cirebon Selatan. Cirebon Utara yang merupakan wilayah Kesultanan Cirebon meliputi distrik Losari, Gebang, Sindangkasih, Talaga, Kuningan, Cikaso, Matang Aji, Rajagaluh, Bengawan Wetan, Bengawan Kulon, Paparean, dan Panjalu. Cirebon Selatan disebut *Cheribonsche Preangerlanden* (Hardjasaputra dan Haris, 2011: 136).

Daerah Kabupaten Majalengka pada zaman pemerintahan kolonial Belanda termasuk wilayah Cirebon Utara. Sejak itu pemerintah kolonial Belanda

mengeksplorasi lahan untuk dijadikan perkebunan. Sejalan dengan itu tumbuhlah permukiman-permukiman kecil menjadi kota. Beberapa pusat permukiman tersebut ada yang kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan kabupaten termasuk di antaranya Majalengka. Secara politis dapat dikatakan pemerintahan kabupaten di Majalengka banyak mendapat pengaruh sistem pemerintahan kolonial. Namun demikian, secara fisik, budaya bermukim dalam bentuk kampung hingga menjadi kota tidak dapat dilepaskan dari budaya yang ada sebelumnya ketika masih berupa kerajaan-kerajaan kecil. Dengan demikian, konsep dan struktur permukiman tidak akan lepas dari konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan hal ini terdapat permasalahan yang perlu dibahas, yaitu bagaimana kondisi topografis dan pola Kota Majalengka.

Untuk membahas permasalahan tersebut diterapkan tipe penelitian eksploratif dan deskriptif dengan mengikuti pola penalaran induktif. Teknik penjarangan data dilakukan melalui observasi lapangan. Pelaksanaan observasi ditekankan pada data arkeologis yang berkaitan dengan permasalahan pola dan struktur perkotaan Majalengka. Berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dilakukan sintesis sehingga dapat diketahui kondisi, pola, dan struktur Kota Majalengka. Eksplanasi terhadap konsep yang melatarbelakangi pemilihan lokasi dan struktur kota dilakukan berdasarkan hasil kajian terhadap naskah-naskah lama yang berkenaan dengan permukiman.

Dalam telaah arkeologi permukiman diperlukan pemahaman terhadap data yang dapat memberikan gambaran mengenai beberapa faktor penentu pola permukiman meliputi sistem organisasi

sosial, lingkungan, arsitektur, dan tata guna lahan. Jenis data yang menyangkut sistem organisasi sosial meliputi seluruh pranata sosial, antara lain berkenaan dengan struktur birokrasi, sistem mata pencaharian, dan sistem religi. Data lingkungan meliputi topografi, batuan, tanah, air, dan iklim. Data tata guna lahan terdiri dari prasarana transportasi, baik yang bersifat alamiah maupun buatan, bangunan, limbah, dan *feature* (Mundardjito, 1990: 24-26).

Salah satu teori tentang proses terjadinya kota menyatakan bahwa kota dapat terbentuk secara spontan dan direncanakan. Kota yang terbentuk secara spontan biasanya tumbuh dalam jangka waktu lama. Pertumbuhan kota tersebut didukung oleh banyak faktor antara lain geografi, ekonomi, sosial, dan politik. Kota yang direncanakan merupakan kota yang sengaja didirikan oleh penguasa (Hourani, 1970: 9-10). Meskipun demikian, kota yang semula berdiri secara spontan dalam perkembangannya diikuti pula dengan perencanaan matang.

Munculnya suatu kota juga disebabkan oleh perdagangan. Pada mulanya kota hanya berupa tempat pertemuan pedagang. Karena lokasi yang strategis disertai perkembangan perdagangan jarak jauh mendorong munculnya suatu kota. Berdasarkan beberapa teori tentang munculnya perkotaan, dapat dikatakan bahwa sebagai faktor utama yang menyebabkan munculnya kota adalah adanya kerja sama dan persaingan antar individu atau kelompok sehingga masyarakat berkembang dari homeostatis menjadi masyarakat heterogen (Flannery, 1979: 32).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Legenda

Menurut cerita sejarah yang berkembang di masyarakat, di Majalengka dikenal adanya Kerajaan Talaga. Leluhur raja-raja yang berkuasa di Talaga adalah Suryadewata putera Prabu Linggabuana. Suryadewata meninggal karena berburu di hutan. Setelah meninggal Suryadewata mendapat julukan *sang mokteng wanaraja*. Suryadewata mempunyai putra bernama Sudayosa yang menjadi pendeta Buddha. Sudayosa mendirikan padepokan di Gunung Bitung kawasan Majalengka. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Batara Gunung Bitung.

Padepokan Gunung Bitung berkembang pada masa kepemimpinan Darmasuci. Karena pengikutnya semakin banyak, Darmasuci kemudian mendirikan Kerajaan Talaga yang berlatarkan agama Buddha. Darmasuci digantikan oleh puteranya yang bernama Prabu Talagamanggung. Pada tahun 1530 M Cirebon menjadi pusat kekuasaan di pesisir utara. Kerajaan Talaga yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda Kawali, beralih menjadi di bawah kekuasaan Cirebon. Pada masa ini Kerajaan Talaga dipimpin oleh Batara Sakawayana yang dikenal dengan Sunan Corenda atau Sunan Parung. Ajaran Islam pun menyebar ke daerah-daerah dibawa oleh para santri dari Cirebon. Sunan Parung kemudian digantikan oleh Raden Ranga Mantri atau lebih dikenal dengan Prabu Pucuk Umum. Pada masa pemerintahannya agama Islam berkembang dengan pesat. Banyak rakyatnya yang memeluk agama tersebut hingga akhirnya Prabu Pucuk Umum memeluk agama Islam. Agama Islam berpengaruh besar ke daerah-daerah

kekuasaannya, antara lain Maja, Rajagaluh dan Majalengka.

Prabu Pucuk Umum sebelum wafat menunjuk putera-puteranya untuk memerintah di daerah-daerah kekuasaan. Sunan Wanaperih memegang pemerintahan di Walangsuji (Talaga), Dalem Lumaju Agung di kawasan Maja, Dalem Panuntun di Majalengka, dan Prabu Haurkuning di Ciamis. Pemerintahan Sunan Wanaperih di Talaga digantikan oleh Apun Surawijaya. Pangeran Surawijaya wafat dan digantikan oleh Pangeran Dipati Wiranata (Iskandar, 1997: 244-247).

Pada sekitar tahun 1480 M, di Desa Sindangkasih dikenal tokoh bernama Nyi Rambut Kasih yang masih memeluk Hindu. Sekitar tahun 1485 M putera Raden Ranga Mantri (Prabu Pucuk Umum) yang bernama Dalem Panungtung diperintahkan menjadi *Dalem* di Majalengka. Kondisi demikian membawa akibat pemerintahan Nyi Rambut Kasih terjepit oleh pengaruh agama Islam (Kartika, 2007: 15). Keberhasilan penyebaran Islam di wilayah Majalengka berkat andil Pangeran Muhammad beserta isterinya (Suleiman dkk., 1982: 31). Pada tahun 1552 - 1570 Cirebon dipimpin oleh Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati). Di Cirebon terjadi wabah demam. Syarif Hidayatullah memerintahkan Pangeran Muhammad beserta istri yang bernama Siti Armilah atau Gedeng Badori untuk mendatangi Nyi Rambut Kasih. Kedatangannya ini dengan maksud untuk mencari pohon maja sekaligus menyebarkan Islam. Sampai di daerah Sindangkasih Pangeran Muhammad tidak menemukan pohon maja. Karena tidak ada, Pangeran Muhammad berkata "*Maja langka*" yang artinya maja tidak ada. Karena gagal, Pangeran Muhammad

tidak mau kembali ke Cirebon dan akhirnya wafat di daerah kaki gunung. Lokasi itu sekarang dikenal dengan sebutan Margatapa. Pencarian pohon maja dan penyebaran Islam dilanjutkan oleh Siti Armilah. Siti Armilah berhasil menemui Nyi Rambut Kasih. Kerajaan Sindangkasih akhirnya menerima Islam, namun Nyi Rambut Kasih menolak dan tetap memeluk agama Hindu hingga akhir (Kartika, 2007: 16-17).

Tahun 1650 Majalengka masuk pengaruh Mataram karena Cirebon telah menjadi kekuasaan Mataram. Waktu itu Cirebon dipegang oleh Panembahan Ratu II atau Sunan Girilaya. Tahun 1628 Tumenggung Bahureksa diperintahkan oleh Sultan Agung menyerang Batavia. Pasukan dan logistik untuk keperluan penyerangan dibantu dari berbagai daerah. Di daerah Majalengka Utara didirikan loji-loji untuk persediaan logistik. Loji banyak didirikan di Jatiwangi, Jatitujuh dan Ligung. Mataram berpengaruh besar terhadap Majalengka, di mana banyak orang Mataram yang tidak sempat kembali ke tempat asalnya dan menetap di Majalengka (Graaf, 2002: 177).

Tahun 1705, seluruh Jawa Barat masuk kekuasaan Hindia Belanda. Pada tahun 1706 pemerintah kolonial menetapkan Pangeran Aria Cirebon sebagai gubernur untuk seluruh Priangan. Para bupati diberi wewenang untuk mengambil pajak dari rakyat, termasuk Majalengka, bagi kepentingan upeti kepada pemerintah Belanda. Paksaan penanaman kopi di daerah Maja, Rajagaluh, dan Lemahsugih mengakibatkan banyak rakyat yang jatuh kelaparan.

Tidak saja tanam paksa kopi, pemerintah Hindia Belanda pun memaksa rakyat untuk menanam lada, tebu dan

tanaman lain yang laku di pasaran Eropa. Hal ini semakin menambah berat beban rakyat sehingga kesengsaraan dan kelaparan terjadi di mana-mana. Tahun 1805 terjadi pemberontakan oleh Bagus Rangin dari Bantarjati menentang Belanda. Tanggal 12 Juli 1812 Bagus Rangin menerima hukuman penggal kepala di Ci Manuk dekat Karangsambung. Penanaman beberapa komoditas secara paksa kepada rakyat terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Hindia Belanda Henrick Wiesel (1804-1808) dan dilanjutkan oleh Herman Willem Daendels (1808-1811) (Lombard, 1996: 105-107). Sesudah Herman Willem Daendels, kekuasaan tanah Jawa beralih ke pihak Inggris dan dipimpin oleh Thomas St. Raffles (Daliman, 2012: 20).

Masa kekuasaan Inggris tidak berlangsung lama yaitu dari 1811 hingga 1816, selanjutnya kembali ke tangan Belanda. Pihak Belanda kemudian melakukan restrukturisasi wilayah. Berdasarkan *Staatsblad* 1819 No. 9, Kabupaten Maja resmi dibentuk oleh kolonial. Ibukota pertamanya adalah Sindangkasih. Kabupaten Maja berbatasan dengan Kabupaten Sumedang di sebelah barat, Kabupaten Indramayu di sebelah utara, Kabupaten Cirebon dan Kuningan di sebelah timur, serta Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya di sebelah selatan (Kartika, 2007: 24). Baru berjalan sekitar 20 tahun, Kabupaten Maja berubah menjadi Kabupaten Majalengka dengan ibu Kota Majalengka. Kemajuan pesat Majalengka membuat hal itu terjadi. Fasilitas yang representatif untuk menjalankan pemerintahan terdapat di Majalengka. Perpindahan itu tentu berdampak kepada kehidupan masyarakat.

Secara fisik, pembangunan fasilitas semakin banyak. Sarana transportasi

darat, dalam hal ini kereta api, termasuk di dalamnya. Tujuannya memudahkan pengangkutan hasil perkebunan dari Kadipaten Majalengka ke Cirebon. Kondisi geografis yang menguntungkan berhasil menarik investor perkebunan ke Majalengka.

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat turut berubah. Pekerjaan semakin bervariasi walaupun mayoritas hanya menjadi buruh. Sepintas mungkin terlihat lebih baik, tetapi yang terasa adalah lebih buruk. Para buruh harus bersusah payah memenuhi kebutuhan hidupnya sebelum menerima gaji dengan cara meminjam uang dengan bunga berlipat. Dari pemukiman sederhana menjadi kabupaten yang rumit (Kartika, 2007: 43-101).

Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Majalengka

Kabupaten Majalengka berada di bagian timur Provinsi Jawa Barat. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Indramayu di utara, Cirebon dan Kuningan di timur, Ciamis dan Tasikmalaya di selatan, serta Sumedang di barat. Keadaan morfologi dan fisiografi wilayah Kabupaten Majalengka sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh perbedaan ketinggian suatu daerah dengan daerah lainnya.

Morfologi wilayah Kabupaten Majalengka dapat dibagi dalam tiga zona yaitu (1) morfologi dataran rendah yang meliputi Kecamatan Kadipaten, Panyingkiran, Dawuan, Jatiwangi, Sumberjaya, Ligung, Jatitujuh, Kertajati, Cigasong, Majalengka, Leuwimunding, dan Palasah. Kemiringan tanah di daerah ini antara 5%-8% dengan ketinggian antara 20-100 m di atas permukaan laut

(dpl), kecuali di Kecamatan Majalengka tersebar beberapa perbukitan rendah dengan kemiringan antara 15%-25%. (2) Morfologi berbukit dan bergelombang meliputi Kecamatan Rajagaluh dan Sukahaji sebelah Selatan, Kecamatan Maja, sebagian Kecamatan Majalengka. Kemiringan tanah di daerah ini berkisar antara 15-40%, dengan ketinggian 300-700 m dpl. (3) Morfologi perbukitan terjal meliputi daerah sekitar Gunung Ciremai, sebagian kecil Kecamatan Rajagaluh, Argapura, Talaga, sebagian Kecamatan Sindangwangi, Cingambul, Banjaran, Bantarujeg, Lemahsugih dan Kecamatan Cikijing bagian Utara. Kemiringan di daerah ini berkisar antara 25%-40% dengan ketinggian antara 400-2000 m dpl.

Bagian utara wilayah kabupaten ini adalah dataran rendah, sedangkan di bagian selatan berupa pegunungan. Gunung Ciremai (3.076 m) berada di bagian timur, yakni di perbatasan dengan Kabupaten Kuningan. Gunung ini adalah gunung tertinggi di Provinsi Jawa Barat, dan merupakan taman nasional dengan nama Taman Nasional Gunung Ciremai. Curah hujan tahunan rata-rata di Kabupaten Majalengka berkisar antara 2.400 mm-3.800 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan sebanyak 11 hari/bulan.

Berdasarkan aspek hidrologis, Kabupaten Majalengka mempunyai beberapa jenis potensi sumber daya air yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sungai yang besar di antaranya adalah Ci Lutung, Ci Deres, Ci Keruh, Ci Herang, Ci Kadondong, Ci Waringin, Ci Longkrang, Ci Awi, dan Ci Manuk (Seksi Neraca Wilayah dan Statistik, 2013: 1-3).

Kota Majalengka

Kota Majalengka terlihat sebagai kota yang dibangun secara terencana pada awal abad ke-20. Sebagai kota yang direncanakan, Majalengka dibangun mengikuti pola kota-kota pada umumnya, yaitu adanya jaringan jalan yang berpotongan secara tegak lurus. Sistem perencanaan jalan dengan pola kisi pertama kali dikenal di Mohenjo Daro pada sekitar 2500 SM. Bentuk kota semacam ini kemudian berkembang menjadi pola *bastides cities* sebagaimana kota-kota benteng. Bagian kota dibagi menjadi blok-blok empat persegi panjang dengan jalan-jalan yang *paralel longitudinal* dan *transversal* membentuk sudut siku-siku (Yunus, 2000: 150). Poros utama kota, yaitu jalan raya yang menghubungkan Majalengka – Cirebon (Jl. Kyai Haji Abdul Halim) berorientasi timur – barat. Topografi kota miring ke arah timur laut sehingga sungai yang membelah kota mengalir dari arah barat ke timur, kemudian bergabung dengan sungai induk ke arah utara. Kota Majalengka terpusat di bagian tengah di mana terdapat alun-alun kota.

1. Kantor Bupati

Di sebelah selatan alun-alun terdapat gedung pusat pemerintahan yang terdiri kantor Bupati dan Sekretariat Daerah (Sekda). Bangunan kantor ini berada pada posisi $06^{\circ}50'11,30''$ LS dan $108^{\circ}13'39,40''$ BT. Gedung Kantor Bupati bergaya perpaduan antara arsitektur lokal dan Eropa. Gaya arsitektur lokal terlihat pada denah dan pembagian ruang yang terdapat bagian pendapa dan ruang induk. Gaya Eropa terlihat pada kolom dan pilaster penyangga atap yang terdapat di ruang pendapa, berbentuk bulat makin ke atas

semakin kecil dengan alur vertikal. Pada bagian kepala tiang tidak terdapat hiasan kecuali hanya cincin melingkar.

Gaya arsitektur Eropa juga terlihat pada bangunan kantor Sekda. Bangunan ini berdenah segi empat. Bagian tengah merupakan halaman. Ruang perkantoran terdapat pada sekeliling halaman. Gaya Eropa terlihat pada bentuk serta ukuran jendela dan pintu. Daun pintu dan jendela menggunakan rangka kayu di bagian tengah dari bahan kaca.

2. Pegadaian

Di sebelah timur alun-alun, pada sudut timur laut tepatnya pada posisi $06^{\circ}50'06,16''$ LS dan $108^{\circ}13'43,70''$ BT terdapat bangunan pegadaian. Pada dasarnya bangunan menghadap ke arah barat, tetapi di sisi utara juga ada jalan. Bangunan utama memanjang timur-barat. Gaya bangunan memperlihatkan percampuran antara arsitektur Cina dan Eropa. Di sisi utara terdapat loket tempat transaksi sebanyak 10 buah. Loket ini sekarang sudah tidak dipakai lagi, karena loket utama yang dipakai adalah yang berada di sisi barat. Di belakang ruangan yang dilengkapi loket terdapat ruangan untuk gudang penyimpanan barang-barang agunan.

Di sebelah barat daya gudang terdapat satu unit bangunan lain. Bangunan ini dilengkapi sumur yang berada di sudut barat laut. Gaya arsitektur bangunan juga memperlihatkan perpaduan antara arsitektur Cina dan Eropa. Pada sisi timur bangunan terlihat adanya pilaster sebanyak empat buah berbentuk persegi. Puncak pilaster kedua dari selatan merupakan puncak bangunan, terdapat hiasan cerobong asap semu. Bangunan ini sekarang tidak dimanfaatkan lagi.

Gambar 1. Bangunan pegadaian (Sumber: Dokumen Nanang Saptono, 2012)

3. Gedung Juang '45

Di sebelah utara alun-alun terdapat gedung DPRD dan Gedung Juang '45. Gedung DPRD terlihat sudah banyak mengalami renovasi, sedangkan Gedung Juang '45 masih memperlihatkan banyak keasliannya. Gedung Juang terletak di sebelah barat DPRD tepatnya berada pada posisi $06^{\circ}50'01,70''$ LS dan $108^{\circ}13'40,01''$ BT.

Gaya arsitektur bangunan memperlihatkan perpaduan antara arsitektur lokal dan Eropa. Pada bagian depan terdapat ruangan terbuka dengan kolom penyangga atap berbentuk persegi. Bagian bawah dan kepala tiang terdapat hiasan tonjolan persegi, selanjutnya pada tiap-tiap antarkolom terdapat bentuk lengkung. Pada bagian dalam ruang terbuka ini terdapat dua kamar yang berada di sisi kanan dan kiri.

Memasuki ruang dalam melewati pintu utama yang diapit jendela. Daun pintu dan daun jendela berbentuk jalusi. Di atas pintu dan jendela dilengkapi bukaan untuk ventilasi. Setelah melewati pintu utama akan menuju ruang tengah semacam aula.

Pada bagian selatan ruang ini juga terdapat kolom persegi. Di sisi barat dan timur aula terdapat ruangan/kamar masing-masing dua buah. Selanjutnya menuju ruang belakang. Gedung Juang '45 sekarang dimanfaatkan untuk kantor beberapa organisasi antara lain FKPPi, Kovavet, dan PEPABRI.

4. Kelenteng Hok Tek Tjeng Sin

Kelenteng Hok Tek Tjeng Sin atau Vihara Pemancar Keselamatan beralamat di Jl. KH Abdul Halim No. 24. Posisi kelenteng berada di sebelah barat alun-alun berjarak sekitar 300 m pada sisi selatan jalan. Secara geografis berada pada posisi $06^{\circ}50'04,81''$ LS dan $108^{\circ}13'28,18''$ BT. Kelenteng dibangun pada tahun 1803. Pada 1903 dilakukan pemugaran dan pada 1993 – 1995 dilakukan perbaikan lagi.

Gerbang utama berada di tengah berbentuk gapura paduraksa dilengkapi daun pintu. Bagian puncak gerbang, pada kedua ujungnya meruncing dan melengkung ke atas. Gerbang ini hanya dibuka pada hari-hari tertentu misalnya hari besar keagamaan. Untuk sehari-hari masuk melalui jalan yang ada di sebelah barat gerbang utama. Seluruh bangunan didominasi warna kuning dan merah. Kuning sebagai lambang kebahagiaan, sedangkan merah (*peng an*) merupakan lambang keselamatan.

Pada sudut barat laut halaman, sebelah barat gerbang utama terdapat bangunan berdenah segiempat, berjenjang susun empat, semakin ke atas semakin kecil. Pada puncak bangunan terdapat hiasan kilin. Hiasan ini melambangkan laki-laki. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat pembakaran uang. Bangunan sejenis juga terdapat pada sudut timur laut halaman.

Pada puncak bangunan ini terdapat hiasan kilin dengan anaknya. Hiasan ini melambangkan perempuan.

Pada jalan masuk utama setelah gerbang terdapat arca kura-kura berada di atas binatang mitologi berkaki empat, tubuhnya rata seperti meja. Selanjutnya, terdapat altar Tuhan Yang Maha Esa. Memasuki serambi depan melewati tangga naik setinggi 20 cm. Pada kanan dan kiri tangga naik terdapat arca kilin.

Secara umum, bangunan utama kelenteng merupakan perpaduan antara arsitektur Eropa dan Cina. Serambi depan berpagar besi berwarna merah. Pada bagian depan serambi terdapat dua kolom berbentuk bulat semakin ke atas semakin kecil. Pada kolom terdapat alur dari bawah ke atas. Pada bagian atas kolom terdapat cincin melingkar. Sisi barat dan timur serambi merupakan dinding yang dilengkapi bukaan yang pada bagian atasnya melengkung. Pada sisi dalam dinding serambi sebelah barat terdapat arca harimau putih. Pada bagian dalam dinding serambi sebelah timur terdapat arca naga. Di ujung depan kedua dinding terdapat pilar berbentuk persegi. Atap bagian serambi rata.

Gambar 2. Arca yang terdapat di depan kelenteng (Sumber: Dokumen Nanang Saptono, 2012)

Ruang utama dilengkapi tiga pintu masuk, masing-masing berdaun pintu ganda. Pintu yang dibuka berada di tengah. Pada ruang utama terdapat altar Hok Tek Tjeng Sin. Atap bangunan utama berbentuk atap pelana dengan penutup genting. Di belakang kelenteng terdapat bangunan yang berfungsi sebagai vihara Buddha.

Gambar 3. Bangunan utama Kelenteng Hok Tek Tjeng Sin (Sumber: Dokumen Nanang Saptono, 2012)

5. Rumah Tinggal

Pada ujung timur Jl. K.H. Abdul Halim, dari alun-alun berjarak sekitar 400 m terdapat bangunan rumah tinggal bergaya *Indisch* perpaduan antara arsitektur Eropa dengan arsitektur lokal. Bangunan ini berada di sisi utara jalan. Secara geografis berada pada posisi 06°50'06,14" LS dan 108°13'55,48" BT. Posisi bangunan di tengah lahan sehingga pada bagian depan dan samping terdapat halaman.

Pada bagian serambi depan terdapat kolom berjumlah delapan yang berkelompok menjadi empat, masing-masing dua kolom secara berhimpitan. Secara umum kolom berbentuk bulat semakin ke atas semakin mengecil. Pada bagian bawah terdapat semacam batur penyangga, demikian pula pada bagian

atas. Bagian bawah dan atas kolom terdapat cincin melingkar. Pada tubuh kolom terdapat alur memanjang. Antar kolom bagian atas dihubungkan dengan *lipsplank* berbentuk tetesan air.

Gambar 4. Rumah tinggal bergaya Indisch di Jalan K.H. Abdul Hali (Sumber: Dokumen Nanang Saptono, 2012)

Pintu masuk terdiri atas lima buah, masing-masing dilengkapi dua daun pintu. Di atas setiap pintu terdapat hiasan melengkung. Atap bangunan utama terdiri dari dua bubungan, masing-masing berbentuk limas memanjang arah barat

– timur. Penutup atap terbuat dari bahan genting.

Konsep Pemilihan Lokasi dan Struktur Kota Majalengka

Berdasarkan sumber sejarah diketahui bahwa Kota Majalengka berkembang dari permukiman-permukiman sederhana yang diawali pada masa Kerajaan Talaga. Perkembangan permukiman sederhana menjadi kota berhubungan dengan beberapa aspek geomorfologis dan sosial. Lahan yang luas dan subur mampu menghasilkan bahan makanan yang cukup bagi jumlah penduduk yang relatif besar. Hal ini terlebih bila didukung dengan teknologi. Bahan makan yang berlebih mengakibatkan adanya saat-saat tertentu terbebas dari pekerjaan pertanian. Waktu senggang inilah yang melahirkan kesempatan untuk memikirkan masalah sosial, usaha peningkatan produksi, mutu hidup, dan religi (Menno dan Alwi, 1992: 13-14).

Di Nusantara, khususnya Jawa, banyak prasasti yang memberikan kete-

Gambar 5. Denah Pola Kota Majalengka (dibuat oleh Nanang Saptono berdasarkan foto satelit Google Earth pencitraan tanggal 21 September 2009)

rangan bahwa negara-negara sebelum Singasari zaman Kertanegara tidak menghasilkan kedaulatan/kekuasaan kerajaan yang mantap. Meskipun *pura* atau *kuta* sudah dikenal dalam bahasa sejak abad ke-5, penerapan konsep *negara* dengan pusat kekuasaan yang mantap dan bermasyarakat kota belum tampak sebelum abad ke-14. Dengan demikian kota pertama di Nusantara yang mungkin sudah mempunyai struktur permukiman kota adalah Trowulan, kota Majapahit (Wiryomartono, 1995: 1).

Kota adalah lembaga yang bergantung pada bentuk spesialisasi yang hanya mungkin ada dalam suatu masyarakat bernegara. Arti penting kota bagi negara adalah fungsi-fungsinya yang dapat diperankan. Sekurang-kurangnya kota menjalankan empat fungsi pokok, yaitu (1) fungsi ideologis, (2) fungsi administratif, (3) fungsi politik, dan (4) fungsi ekonomi. Dalam hal fungsi ideologis, kota menjalankan perannya sebagai pusat pemujaan dan ritus-ritus serta pusat simbol dan gengsi politik (Rahardjo, 2007: 6).

Dalam rangka memenuhi fungsi ideologis tersebut terdapat konsep tentang pemilihan tempat dan pola pemukiman. Pada masyarakat Sunda terdapat pemeo yang berbunyi *Ngaraksa Sasaka Pusaka Buana* yang bermakna bahwa lahan yang subur harus tetap terjaga subur, sumber air tidak tercemar, udara terjaga bersih, semua makhluk hidup mendapat ruang hidup masing-masing sesuai dengan waktu dan tempatnya. Manfaatnya adalah agar *buana bumi* dapat diwariskan kepada anak cucu atau *incu putu* sebagai bumi yang mampu memberikan kehidupan yang berkecukupan kepada semua makhluk hidup di dalamnya, sebagaimana para karuhun telah menikmatinya. Pemilihan

lahan selalu memperhatikan bagaimana letaknya, kemiringannya, bekas apa pada masa lalunya, warna dan aroma lahan, serta bentuk alamiah lahan tersebut (Harun dan Rusnandar, 2011: 19-20).

Di dalam teks *Sanghyang Siksakandaning Karesian* disebutkan adanya lahan yang disebut sebagai tanah kotor. Tanah-tanah tersebut adalah *sodong*, *sarongge*, *cadas gantung*, *mungkal patenggang*, *lebak*, *rancak*, *kebakan badak*, *catang nunggang*, *catang nongeng*, *garunggungan*, *garenggengan*, *lemah sahar*, *dangdang warian*, *hunyor*, *lemah laki*, *pitunahan celeng*, *kalomberman*, *jaryan*, dan *kuburan* (Danasasmita dkk, 1987: 111). Di samping itu terdapat lahan yang dinilai baik untuk permukiman. Lahan yang bersifat baik tersebut adalah *galudra ngupuk*, *pancuran emas*, *satria lalaku*, *kancah nangkub*, *gajah palisungan*, *gajah katunan*, dan *bulan purnama* (Harun dan Rusnandar, 2011: 23).

Secara geomorfologis, kawasan Majalengka merupakan pedataran yang berada di dataran tinggi. Di sebelah tenggara terdapat Gunung Ciremai dan di sebelah barat laut terdapat Gunung Tampomas. Letak lahan yang demikian ini merupakan lahan dengan tipe *galudra ngupuk*, yaitu lahan yang letaknya di antara dua bukit atau gunung. Lahan demikian akan mendatangkan kekayaan duniawi.

Secara lebih sempit, teks *Warugan Lemah* memberikan pedoman mengenai lahan yang baik untuk permukiman. Berdasarkan topografi lahan, dapat diketahui terdapat empat jenis lahan yang dianggap membawa dampak baik, yaitu *talaga hangsa* (tanah yang condong ke kiri), *ngalingga manik* (tanah membentuk

bukit dengan pemukiman di atasnya), *singha purusa* (tanah memotong bukit), dan *sumara dadaya* (tanah datar). Penyebutan arah kiri (*kenca*) terkesan sangat relatif bergantung pada arah mata angin mana yang dijadikan pedoman. Penyebutan kiri-kanan-depan-belakang di dalam teks *Warugan Lemah* cenderung bersifat relatif (setidaknya untuk pembaca modern), sedangkan timur-barat-utara-selatan lebih bersifat absolut.

Petunjuk dalam menyesuaikan arah relatif sebagaimana tertuang dalam teks ke dalam arah absolut terdapat pada paragraf 04, yaitu digunakannya istilah *purba tapa* untuk topografi tanah yang condong ke depan. *Purba* (atau *purwa*) berasal dari bahasa Sansekerta yang dapat diartikan depan, awal, dahulu, pertama, tetapi terdapat pengertian lain yang penting untuk dicatat, yaitu “timur” (Gunawan, 2010: 151-157). Timur adalah tempat terbitnya matahari. Oleh karena itu, persoalan perspektif yang muncul pada teks *Warugan Lemah* kiranya dapat ditafsirkan sebagai berikut (1) *talaga hangsa* adalah istilah untuk tanah yang cenderung menurun (*bahé*) ke arah utara; (2) *banyu metu* adalah istilah untuk tanah yang cenderung menurun ke arah barat; (3) *purba tapa* adalah istilah untuk tanah yang cenderung menurun ke arah timur; dan (4) *ambek pataka* adalah istilah untuk tanah yang cenderung menurun ke arah selatan (Gunawan, 2010: 158). Secara topografis, lahan Kota Majalengka condong ke arah utara. Dengan demikian, menurut teks *Warugan Lemah* lahan Kota Majalengka merupakan lahan *talaga hangsa* yang baik untuk permukiman.

Selain memiliki lokasi struktur dan pola kota, Kota Majalengka juga mempunyai latar belakang ideologis. Kota Majalengka

dibagi dalam blok-blok empat persegi panjang dengan jalan-jalan yang *paralel longitudinal* dan *transversal* membentuk sudut siku-siku. Pola kota semacam ini sudah dikenal sejak zaman Majapahit di Trowulan. Lahan Kota Trowulan dibagi menjadi sembilan kotak mengikuti konsep *Triangga*. Dalam konsep *Triangga* terdapat tiga bagian (*nista*, *madya*, *utama*) yang dapat diterapkan secara vertikal dan horisontal sehingga akan menjadi sembilan area. Di Trowulan sembilan area tersebut tercipta berdasarkan perpotongan jalur permukiman. Penataan lahan inti mengikuti konsep *Triangga* dengan pembagian *Sanga Mandala* (Munandar, 2013: 25-35).

Kota dari masa Islam yang dibangun dengan pola blok, misalnya, Kota Surakarta. Salah satu ciri utama Kota Surakarta adalah tidak adanya tembok kota. Kota Surakarta secara umum terbagi dua oleh jalan utama memanjang arah timur – barat. Dengan adanya jalur ini, kota terbagi menjadi kota selatan dan kota utara. Kraton, masjid, dan rumah para pangeran terletak di sebelah selatan. Di sebelah utara terletak saran profan seperti Kepatihan dan pasar (Santoso, 2008: 160-165).

Sebagaimana kedua kota tersebut yaitu antara kota yang dilatari religi Hindu-Buddha dan Islam terlihat bahwa ada pembagian ruang dalam blok-blok kota. Pola dan struktur Kota Majalengka juga memperlihatkan hal yang demikian. Meskipun secara umum kota terbagi dua oleh poros jalan raya, namun poros tersebut bukan merupakan poros utama. Fasilitas sakral seperti pusat pemerintahan, masjid, dan kelenteng/vihara berada di bagian barat kota. Sedangkan fasilitas profan berada di bagian timur.

SIMPULAN

Permukiman di Majalengka berkembang sejak zaman Hindu-Buddha hingga masa pemerintahan kolonial Belanda. Kota Majalengka itu sendiri dibangun pada masa kolonial Belanda. Meskipun demikian tampak bahwa pemilihan lokasi dalam kaitannya dengan kondisi geomorfologi serta struktur kota, mengikuti konsep yang sudah dikenal masyarakat Sunda. Konsep pemilihan lahan antara lain terdapat di dalam beberapa teks Sunda Kuna. Di dalam teks-teks tersebut terdapat konsep tentang kedudukan/posisi dan kondisi geomorfologis lahan yang dinilai bagus untuk pemukiman. Di dalam teks *Sanghyang Siksakanda ng Karesian* dikenal adanya lahan dengan tipe *Galudra Ngupuk*, sedangkan di dalam teks *Warugan Lemah* terdapat pemahaman

tentang kondisi lahan yang disebut *talaga hangsa*. Posisi wilayah Majalengka berada pada tipe *Galudra Ngupuk*, yaitu berupa pedataran tinggi di antara dua gunung. Posisi lahan yang demikian dinilai bagus untuk pemukiman. Sedangkan lahan Kota Majalengka merupakan lahan dengan tipe *talaga hangsa*, yaitu lahan yang condong ke arah utara.

Struktur Kota Majalengka terdiri dari beberapa blok. Elemen-elemen yang membentuk permukiman Kota Majalengka terdiri dari beberapa fasilitas baik itu bersifat profan maupun sakral. Secara keruangan bagian barat kota merupakan kawasan sakral yang ditandai dengan adanya masjid dan klenteng. Sedangkan bagian timur merupakan kawasan profan yang ditandai dengan sarana perekonomian dan perkampungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atja. 1972. *Tjarita Purwaka Tjaruban Nagari*. Jakarta: Ikatan Karyawan Museum.
- Cortese, Armando. 1967. *The Suma Oriental of Tomé Pires*. London: The Hakluyt Society.
- Daliman, A. 2012. *Sejarah Indonesia Abad XIX – Awal Abad XX*. Yogyakarta: Ombak.
- Danasasmita, Saleh dkk. 1987. *Sewaka Darma (Kropak 408) Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630), Amanat Galunggung (Kropak 632) Transkripsi dan Terjemahan*. Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Flannery, Kent V. 1979. The Cultural Evolution of Civilizations. Dalam Gregory L. Possehl (Ed.) *Ancient Cities of the Indus: 27 – 43*. Durham: Carolina Academic Press.
- Graaf, H.J. de dan Pigeaud, Th. G. Th. 1985. *Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa*. Jakarta: Grafitipers dan KITLV.
- Graaf, H.J. de. 2002. *Puncak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung*. Jakarta: KITLV – Pustaka Utama Grafiti.
- Gunawan, Aditya. 2010. Warugan Lemah: Pola Permukiman Sunda Kuna. *Seri Sundalana*, 9: 147 - 181. Bandung: Kiblat
- Hardjasaputra, A. Sobana dan Haris, Tawalinuddin. 2011. *Cirebon Dalam Lima Zaman (Abad ke-15 Hingga Pertengahan Abad ke-20)*. Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

- Harun, Ismet Belgawan dan Rusnandar, Nandang. 2011. *Arsitektur Rumah dan Permukiman Tradisional di Jawa Barat*. Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- Hourani, A.H. 1970. The Islamic City in the Light of Recent Research”. Dalam Hourani, A.H. dan Stern, S.M. (Ed.) *The Islamic City a Colloquium*: 9 – 24. Oxford: Bruno Cassirer and University of Pennsylvania Press.
- Iskandar, Yoseph. 1997. *Sejarah Jawa Barat (Yuganing Rajakawasa)*. Bandung: Geger Sunten.
- Kartika, N. 2007. *Sejarah Majalengka*. Bandung: Uvula Press.
- Lombard, Denys. 1996. *Nusa Jawa: Silang Budaya 1. Batas-batas Pembaratan*. Jakarta: Gramedia.
- Menno, S dan Mustamin Alwi. 1992. *Antropologi Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munandar, Agus Aris. 2013. Tidak Ada Kanal di Kota Majapahit. *Makalah Presentasi Hasil Penelitian*. Depok, 7 Maret: Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
- Mundardjito. 1990. Metode Penelitian Permukiman Arkeologi. *Lembaran Sastra, 11, Edisi khusus Monumen Karya Persembahan Untuk Prof. Dr. R. Soekmono*: 19 - 30. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Rahardjo, Supratikno. 2007. *Kota-kota Prakolonial Indonesia, Pertumbuhan dan Keruntuhan*. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
- Santoso, Jo. 2008. *Arsitektur-kota Jawa, Kosmos, Kultur & Kuasa*. Jakarta: Centropolis.
- Seksi Neraca Wilayah dan Statistik, 2013: *Kabupaten Majalengka Dalam Angka 2013*. Majalengka: Badan Pusat Statistik - Kabupaten Majalengka.
- Suleiman, Satyawati dkk. 1982. Latar Belakang Sejarah. Dalam Abdurachman, Paramita R. (Ed.). 1982. *Cerbon*: 11 – 26. Jakarta: Yayasan Mitra Budaya Indonesia, Sinar Harapan.
- Wiryomartono, A. Bagoes P. 1995. *Seni Bangunan dan Seni Binakota di Indonesia. Kajian Mengenai Konsep, Struktur, dan Elemen Fisik Kota Sejak Peradaban Hindu-Buddha, Islam Hingga Sekarang*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yunus, Hadi Sabari. 2000. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.